



**PEMERINTAH  
KABUPATEN  
KAPUAS HULU**

**KAPUAS HULU  
HEBAT!**

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2024**



## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semua substansif Laporan Kinerja Ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintah, pelaksana kebijakan, serta pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi dan visi Bupati Kapuas Hulu.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan bidang pertanian Kabupaten Kapuas Hulu tidak terlepas dari kerjasama dan kerjakeras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.



Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Putussibau, Februari 2025  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
Kabupaten Kapuas Hulu



HIACINTHUS GUNUNG AGUNG, S.H., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19830705 201001 1 023

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
IKTHISAR EKSEKUTIF.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum .....	1
1. Pendahuluan .....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu .....	2
3. Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu .....	2
4. Sumber Daya Aparatur Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu .....	6
5. Sumber Daya Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu .....	7
6. Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu .....	8
7. Permasalahan Utama Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu .....	10
8. Sistematisa Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .....	11
<b>BAB II PERENCANAAN STRATEGI.....</b>	<b>12</b>
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	12
1. Tujuan dan Sasaran .....	14
1.1 Tujuan .....	14
1.2 Sasaran .....	15
B. Perjanjian Kinerja .....	18
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>22</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	22
1. Pengukuran Kinerja .....	22
a. Metode Pengukuran Kinerja .....	22
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	25



1. Skor PPH .....	27
2. Peningkatan Produksi Pertanian .....	32
a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura .....	33
b. Peningkatan Produksi Peternakan .....	38
c. Peningkatan Produksi Perkebunan .....	44
d. Meningkatnya Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian ..	47
B. Realisasi Anggaran .....	53
BAB IV PENUTUP .....	78

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 .....	6
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Unit Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 .....	7
Tabel 1.3	Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 .....	8
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah...	15
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.....	23
Tabel 3.2	Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Petani Melalui Peningkatan Produksi Komoditi Potensial Sektor Pertanian .....	25
Tabel 3.2.1	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya.....	26
Tabel 3.2.2	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Jumlah Produksi Pertanian Dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya.....	30
Tabel 3.3	Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu .....	48
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya.....	51



## IKTHISAR EKSEKUTIF

Mengacu pada Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana diamanatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*). SAKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, dimana instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah *mind-set* para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (*inputs oriented accountabillity*) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (*result oriented accountabillity*), terutama berupa *outcomes*. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Dinas Pertanian, dan Pangan adalah sebagai Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten dengan sumber dana dan daya manusia yang ada telah berusaha secara maksimal meningkatkan Kinerja dalam rangka peningkatan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024 ditetapkan sebanyak 2 (Dua) arah kebijakan dan 2 (Dua) sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya didukung oleh 10 program, 26 kegiatan dan 69 sub kegiatan strategis yang harus dicapai selama Tahun 2024, dan semuanya telah terlaksana.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

#### 1. Pendahuluan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Setiap OPD menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik/*good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan dengan berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu 2021 - 2026, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024 Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten



Kapuas Hulu Tahun 2024, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.

Penyelenggaraan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2024. Penetapan Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional.

Laporan kinerja ini mengungkapkan tingkat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu**

Dinas Pertanian dan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan pangan;
- b) pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan;
- d) pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **3. Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu**

- a) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari:
  - (1) Kepala Dinas;



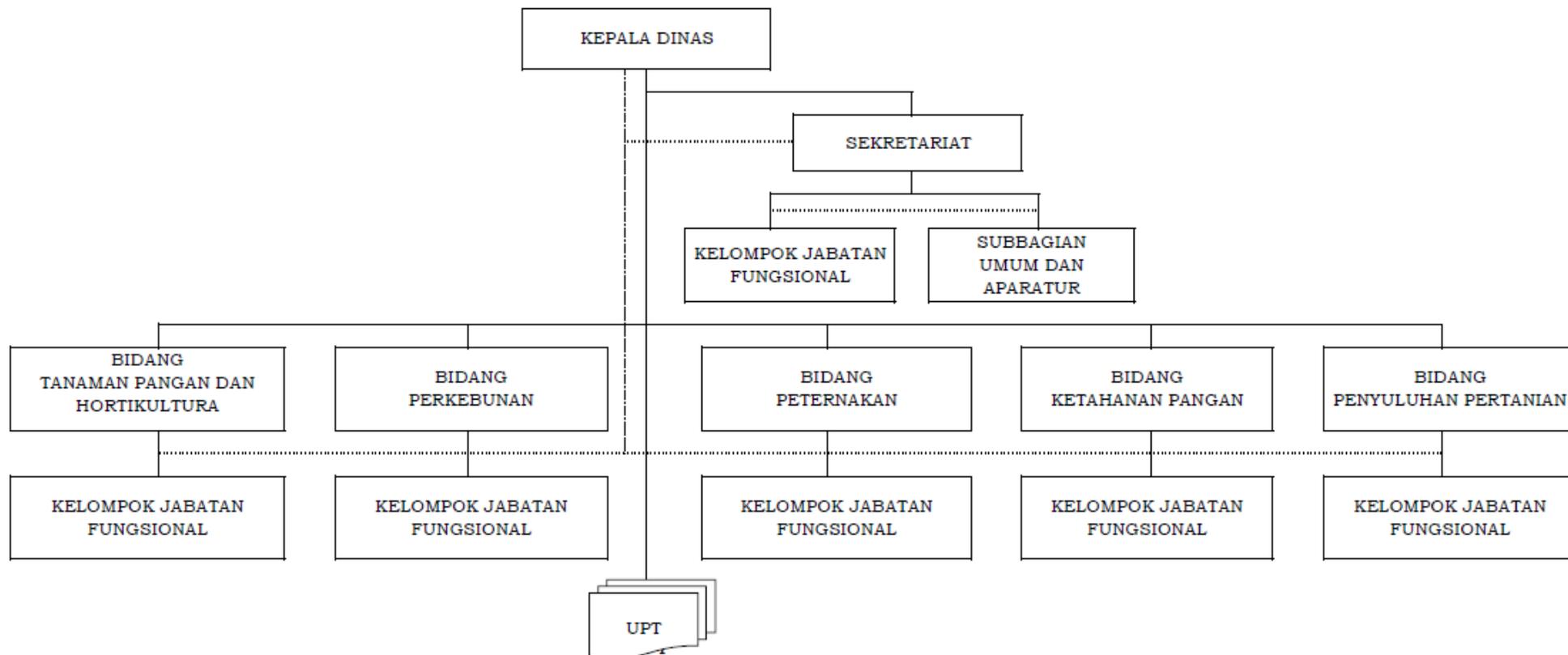
- (2) Sekretariat;
  - (3) Bidang Ketahanan Pangan;
  - (4) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - (5) Bidang Perkebunan;
  - (6) Bidang Peternakan;
  - (7) Bidang Penyuluhan Pertanian;
  - (8) Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
  - (9) Kelompok Jabatan Fungsional.
- b) Bagan struktur organisasi dapat dilihat sebagai berikut:



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KAPUAS HULU  
HEBAT!**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 79 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU



BUPATI KAPUAS HULU,  
TTD  
FRANSISKUS DIAAN



Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu , terdiri atas:

- a) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis di bidang pertanian dan pangan serta tugas pembantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan. Sekretariat terdiri dari:
  1. Subbagian Umum dan Aparatur; dan
  2. kelompok Jabatan Fungsional.
- c) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Pangan. Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari Kepala Bidang dan Jabatan Fungsional.
- d) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari Kepala Bidang dan Jabatan Fungsional.
- e) Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perkebunan. Bidang Perkebunan terdiri dari Kepala Bidang dan Jabatan Fungsional.
- f) Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Peternakan. Bidang Peternakan terdiri dari Kepala Bidang dan Jabatan Fungsional.
- g) Bidang Penyuluh Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Penyuluh Pertanian. Bidang Penyuluh Pertanian terdiri dari Kepala Bidang dan Jabatan Fungsional.



- h) UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- i) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

**4. Sumber Daya Aparatur Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu**

Agar sistem organisasi dapat berjalan secara optimal, dibutuhkan personil yang handal dan prima sesuai dengan disiplin ilmu dan proporsinya masing-masing, baik dalam kualitas maupun kuantitas, sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai instansi teknis dapat bermanfaat bagi publik. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu didukung oleh 244 Orang terdiri dari 39 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah, 80 Orang Jabatan Fungsional , 59 orang Pegawai PPPK (P3K) dan 66 orang Tenaga Kontrak.

Berikut Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan dan Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Unit Kerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan**

NO	JENIS KEPEGAWAIAN	MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN										
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	Ket.
1.	STRUKTURAL	0	1	10	0	0	7	1	13	7	0	39
2.	JABATAN FUNGSIONAL	0	0	17	0	0	11	7	41	4	0	80
3.	PPPK	0	0	18	0	0	10	4	27	0	0	59
4.	TENAGA KONTRAK	0	0	23	0	0	15	1	27	0	0	66
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>13</b>	<b>108</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>244</b>

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2024



**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Unit Kerja**

NO.	JENIS KEPEGAWAIAN	MENURUT GOLONGAN RUANG																Ket.
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1.	STRUKTURAL	0	0	0	0	1	0	6	0	9	1	7	7	8	0	0	0	39
2.	JABATAN FUNGSIONAL	0	0	0	0	3	4	7	2	3	18	16	13	12	1	0	0	79
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2024

Peranan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sangat strategis dalam memberikan pelayanan prima dan profesional kepada publik. Hal ini adalah untuk mewujudkan masyarakat petani dan peternak yang berbudaya ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEK), maju, tangguh, mandiri, berjiwa agribisnis, berbudaya industri, berdaya saing dan berbasis sumber daya lokal.

#### 5. Sumber Daya Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu

Pada awal tahun 2024 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu memperoleh anggaran dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. 51.098.695.715,00. Pada pertengahan tahun ada rasionalisasi anggaran yang disebabkan oleh bertambahnya kebijakan pimpinan dan pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, maka anggaran APBD Dinas pertanian bertambah sebesar Rp 9.636.586.052,00 sehingga total anggaran setelah APBD Perubahan sebesar Rp 60.735.281.767,00.

Dengan rincian sebagai berikut :



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

KAPUAS HULU  
HEBAT!

PROGRAM	ANGGARAN 2024 (Rp)			% CAPAIAN
	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp 690.464.000	Rp 311.356.400	Rp 310.124.422	99,60%
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp 26.837.800	Rp 26.837.800	Rp 26.664.400	99,35%
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp 26.806.500	Rp 26.806.500	Rp 26.775.100	99,88%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 20.780.628.215	Rp 23.884.404.667	Rp 23.419.092.042	98,05%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 490.271.600	Rp 810.686.000	Rp 648.086.790	79,94%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 28.726.253.000	Rp 34.480.578.000	Rp 33.679.046.770	97,68%
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp 133.435.000	Rp 533.435.000	Rp 530.022.589	99,36%
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp 7.169.000	Rp 39.619.800	Rp 32.856.200	82,93%
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rp 10.880.600	Rp 71.557.600	Rp 70.939.520	99,14%
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 205.950.000	Rp 550.000.000	Rp 542.236.300	98,59%
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 51.098.695.715</b>	<b>Rp 60.735.281.767</b>	<b>Rp 59.285.844.133</b>	<b>97,61%</b>

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2024

## 6. Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu

Aset yang dimiliki Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Huluberupa aset bergerak dan aset tidak bergerak Aset bergerak berupa kendaraan dinas dan hewan-hewan ternak, sedang aset tidak bergerak berupa gedung dan tanah beserta perlengkapannya serta tanaman yang berada di kantor dinas, UPTD Kelansin dan Balai Penyuluh Pertanian yang tersebar di kecamatan. Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh



langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun secara khusus perlu adanya penambahan alat transportasi bagi penyuluh untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada Tabel 1.3, sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Pangan**  
**Kabupaten Kapuas Hulu**

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Satuan Barang	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Tanah	33	Bidang	
2.	Peralatan dan Mesin			
	Alat Angkutan			
	• Alat Angkut Bermotor	73	Unit	
	• Alat Bengkel dan Ukur	61	Unit	
	Alat Pertanian			
	• Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman	12	Unit	
	• Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	-	Unit	
	• Alat Panen	8	Unit	
	• Alat Pasca Panen	-	Unit	
	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
	• Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	10	Buah	
	• Alat Kantor Lainnya	55	Buah	
	• Meubelair	133	Buah	
	• Alat Pembersih	1	Unit	
	• Alat Pendingin	43	Unit	
	• Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	28	Unit	
	• Meja Kerja Pejabat	9	Buah	
	• Kursi Kerja Pejabat	8	Buah	
	• Lemari Dan Arsip Pejabat	61	Buah	
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar			
	• Peralatan Studio Audio	8	Unit	
	• Peralatan Studio Video Dan Film	25	Unit	
	• Alat Komunikasi Telephone	2	Unit	
	• Alat Komunikasi Sosial	20	Unit	
	• Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	1	Unit	
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	5	Buah	
	Alat Laboratorium	39	Buah	



	Komputer			
	• Personal komputer	80	Unit	
	• Peralatan komputer	46	Unit	
3.	Gedung dan Bangunan			
	• Bangunan Gedung	23	Unit	
	• Bangunan Pertanian	-	Unit	
	• Rumah Negara	16	Unit	
	• Pagar	23	Unit	
4.	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	13	Buah	
5.	Aset Tetap Lainnya			
	• Buku Peraturan	71	Buah	
	• Sapi	15	Ekor	

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2024

## 7. Permasalahan Utama Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan seperti yang telah diuraikan diatas, dalam melaksanakan urusannya permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Keberadaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu belum optimal menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
2. Terbatasnya frekuensi pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur pertanian.
3. Daerah binaan yang luas, Keterbatasan Penyuluh Pertanian dengan jumlah penduduk yang relatif jarang dan kurang merata, sehingga penyuluhan ke masyarakat menjadi terkendala.
4. Kegiatan usaha pertanian yang belum terfokus pada peningkatan produksi dan pemasaran.
5. Pengetahuan dan keterampilan petani relatif masih rendah.
6. Teknologi yang digunakan oleh petani masih bersifat tradisional dan konvensional, dan belum sepenuhnya menerima teknologi modern.
7. Produksi pertanian lokal belum mampu bersaing/berkompetisi di pasar lokal dan global.
8. Terbatas kemampuan petani dalam bermitra dengan pengusaha, sehingga modal masih lemah.
9. Terbatasnya dukungan sarana dan infrastruktur dibidang pertanian.



## **8. Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2024 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. PERENCANAAN KINERJA.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.

BAB IV. PENUTUP



## BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

### A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah untuk pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026. Selanjutnya Renstra Dinas Pertanian dan Pangan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) setiap tahun yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026 disusun sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah agar dapat bersaing dalam lingkungan global yang semakin ketat. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, antara lain berfungsi sebagai berikut :

1. Untuk memberikan perumusan, arah dan tujuan pembangunan jangka menengah dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dengan menyesuaikan kondisi pada tahun berjalan.
2. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang dalam upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021 – 2026.
3. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini bermakna bahwa RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra SKPD sebagai penjabaran rencana pembangunan daerah disusun dengan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten



Kapuas Hulu dan memperhatikan Renstra Provinsi Kalimantan Barat, Renstra Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat serta Renstra Kementerian Pertanian.

Penyusunan Renstra SKPD sebagaimana RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026 ditempuh dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas.

Hubungan antar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPJPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan umum sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. RPJMD memuat visi, misi, gambaran umum kondisi daerah, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.
3. Renstra SKPD, merupakan penjabaran operasional bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif.
4. Renja OPD, sebagai pedoman perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang berifat indikatif.
5. RKPD berfungsi sebagai pedoman perencanaan tahunan atas Renja SKPD yang merupakan bahan musrenbang RKPD yang berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.



Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan-tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*).

## 1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai dalam kurun waktu jangka pendek, menengah dan panjang 1 sampai 5 tahun, sehingga penetapan tujuan harus didasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Oleh karena itu tujuan harus menyediakan dasar yang kuat menetapkan indikator kinerja.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu ini ditetapkan dengan maksud agar dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 2021-2026. Sedangkan tujuan Perencanaan Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah sebagai berikut :

- 1) Penjabaran visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu secara nyata pada program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran terpadu berbasis kinerja.
- 3) Sinkronisasi program/kegiatan OPD agar terintegrasi dan tidak tumpang tindih.
- 4) Meningkatkan kinerja aparatur yang terukur, transparan, dan akuntabel.
- 5) Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Pertanian dan Perkebunan, yang efektif dan efisien.
- 6) Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD setiap tahunnya, selama kurun waktu 2021-2026.



Dalam mewujudkan tujuan Dinas Pertanian dan Pangan didasarkan pada Visi dan Misi Bupati tahun 2021 – 2026 dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan stake holders.

## 2. Sasaran

Sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjabaran dari misi Bupati dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pertanian dan Pangan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode RPJMD-nya.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai. Sasaran-sasaran pembangunan 5 tahun Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran		Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun-				
							2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah		LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		Persen	4,98	5,18	5,38	5,58	5,78	5,98
	1.1	Meningkatnya pemberdayaan petanmelalui peningkatan produksi komoditi potensial sektor pertanian.	1.	Skor PPH	Angka	69,56	78	79	80	81	82
			2.	Jumlah Produksi Pertanian							
				Padi Sawah	ton	25.346	26.119,00	26.641,38	27.174,21	27.717,69	28.272,05
				Padi Ladang	ton	29.506	30.661,00	31.274,22	31.899,70	32.537,70	33.188,45
				Jagung	ton	263,81	1.126,00	1.148,52	1.171,49	1.194,92	1.218,82
				Ubi Kayu	ton	8.678,18	18.625,00	18.997,50	19.377,45	19.765,00	20.160,30
				Cabe	ton	230,52	236,29,00	241,01	245,83	250,75	255,76
				Bawang Merah	ton	3,65	3,71	3,78	3,86	3,94	4,01
				Jahe	ton	179,79	184,28	187,97	191,72	195,56	199,47
				Sapi	kilo	121.863,00	123.081,63	124.312,45	125.555,57	126.811,13	128.079,24
				Kambing	kilo	3.951,00	3.970,76	3.990,61	4.010,56	4.030,61	4.050,77
				Babi	kilo	77.027,00	77.412,14	77.799,20	78.188,19	78.579,13	78.972,03



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KAPUAS HULU  
HEBAT!**

				Ayam Buras	kilo	54.263,00	54.425,79	54.589,09	54.752,83	54.917,09	55.081,84
				Ayam Ras Pedaging	kilo	1.574.928,00	1.582.802,64	1.590.716,65	1.598.670,24	1.606.663,59	1.614.696,91
				Ayam Ras Petelur	kilo	-	326,00	326,65	327,31	327,96	328,62
				Itik	kilo	533,00	534,07	535,13	536,20	537,28	538,35
				Itik manila	kilo	1.444,00	1.446,89	1.449,78	1.452,68	1.455,59	1.458,50
				Telur Ayam Buras	kilo	10.294,00	10.345,47	10.397,20	10.449,18	10.501,43	10.553,94
				Telur Ayam Ras Petelur	kilo	13.326,00	13.392,63	14.062,26	14.132,57	14.203,24	14.274,25
				Kelapa Sawit	ton	1.094.205,47	1.117.062,78	1.139.920,57	1.162.778,35	1.185.636,14	1.208.493,92
				Karet	ton	19,200	19.776	20.369,28	20.980,36	21.609,77	22.258,06
				Kopi	ton	1,22	1,26	1,29	1,33	1,37	1,41
				Lada	ton	12,10	12,46	12,84	13,22	13,62	14,03
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		Predikat SAKIP Kabupaten Kapuas Hulu		Predikat	B	BB	BB	BB	BB	A
2.1	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu		1.	Predikat SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu	Predikat	BB	BB	BB	A	A	A

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2024



## B. PERJANJIAN KINERJA

Pernyataan Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun. Dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan dengan pernyataan perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program atau kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu akan lebih baik dan terarah.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menyediakan dana melalui APBD Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2024 (setelah perubahan) sebesar Rp 60.735.281.767,00 untuk mendukung implementasi perjanjian kinerja tersebut. Rincian penetapan kinerja yang belum di dokumentasikan dalam ketetapan formal dapat dilihat pada Lampiran.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai berikut :



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HIASINTUS GUNUNG AGUNG, S.H.,M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : FRANSISKUS DIAAN  
Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Putussibau, 25 November 2024

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
Kabupaten Kapuas Hulu,

HIASINTUS GUNUNG AGUNG, S.H.,M.Si

Pembina  
NIP. 19830705 201001 1 023



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Petani Melalui Peningkatan Produksi Komoditi Potensial Sektor Pertanian	1. Skor PPH	80,00
		2. Jumlah Produksi Pertanian	
		• Padi Sawah (ton)	27.174,21
		• Padi Ladang (ton)	31.899,70
		• Jagung (ton)	1.171,49
		• Ubi Kayu (ton)	19.377,45
		• Cabe (ton)	245,83
		• Bawang Merah (ton)	3,86
		• Jahe (ton)	191,72
		• Sapi (kilo)	125.555,57
		• Kambing (kilo)	4.010,56
		• Babi (kilo)	78.188,19
		• Ayam Buras (kilo)	54.752,83
		• Ayam Ras Pedaging (kilo)	1.598.670,24
		• Ayam Ras Petelur (kilo)	327,31
		• Itik (kilo)	536,20
		• Itik Manila (kilo)	1.452,68
		• Telur Ayam Buras (kilo)	10.449,18
		• Telur Ayam Ras Petelur (kilo)	14.132,57
• Kelapa Sawit (ton)	1.162.778,35		
• Karet (ton)	20.980,36		
• Kopi (ton)	1,33		
• Lada (ton)	13,22		
2.	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu	Predikat SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu	BB



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

KAPUAS HULU  
HEBAT!

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	311.356.400	APBD
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	26.837.800	APBD
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	26.806.500	APBD
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.884.404.667	APBD
5.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	810.686.000	APBD & APBN
6.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	34.480.578.000	APBD & APBN
7.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	533.435.000	APBD
8.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	39.619.800	APBD
9.	Program Perizinan Usaha Pertanian	71.557.600	APBD
10.	Program Penyuluhan Pertanian	550.000.000	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>60.735.281.767</b>	

Pihak Kedua,  
BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Putussibau, 25 November 2024  
Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
Kabupaten Kapuas Hulu,



FRANSISKUS GUNUNG AGUNG, S.H.,M.Si  
Pembina  
NIP. 19830705 201001 1 023



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

##### 1. Pengukuran Kinerja

###### a. Metode Pengukuran Kinerja

Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut :

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.



Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

$70 \leq X < 85$  : Berhasil

$55 \leq X < 70$  : Cukup Berhasil

$< 55$  : Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (outcomes). Sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya terbangun. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 per sasaran strategis adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1  
Pengukuran Kinerja  
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pemberdayaan petani melalui peningkatan produksi komoditi pertanian potensial sektor	1. Skor PPH	80,00	82,8	103,50%
		2. Jumlah Produksi Pertanian :			
		- Padi Sawah (ton)	27.174,21	17.861,04	65,73%
		- Padi Ladang (ton)	31.899,70	20.849,80	65,36%
		- Jagung (ton)	1.171,49	1.526,06	130,27%
		- Ubi Kayu (ton)	19.377,45	6.675,15	34,45%
		- Cabe (ton)	245,83	215,73	87,76%
		- Bawang Merah (ton)	3,86	0,11	2,80%
		- Jahe (ton)	191,72	129,66	67,63%
		- Sapi (kilo)	125.555,57	108.660,00	86,54%
		- Kambing (kilo)	4.010,56	3.696,00	92,16%
		- Babi (kilo)	78.188,19	60.729,00	77,67%
		- Ayam Buras (kilo)	54.752,83	84.928,00	155,11%
		- Ayam Ras Pedaging (kilo)	1.598.670,24	1.580.510,00	98,86%
		- Ayam Ras Petelur (kilo)	327,31	3.835,00	1171,67%
		- Itik (kilo)	536,20	967,00	180,34%
		- Itik manila (kilo)	1.452,68	2.082,00	143,32%
		- Telur Ayam Buras (kilo)	10.449,18	10.051,46	96,19%
		- Telur Ayam Ras Petelur (kilo)	14.132,57	0,00	0,00%
- Kelapa Sawit (ton)	1.162.778,35	398.945,87	34,31%		
- Karet (ton)	20.980,36	11.155,00	53,17%		
- Kopi (ton)	1,33	0,82	61,65%		
- Lada (ton)	13,22	8,95	67,70%		



2	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu	1.	Predikat SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan	BB	-	0,00%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						125,05%

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2024

## 2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

### Sasaran 1 :

“Meningkatnya Pemberdayaan Petani Melalui Peningkatan Produksi Komoditi Potensial Sektor Pertanian”

Meningkatnya Pemberdayaan Petani Melalui Peningkatan Produksi Komoditi Potensial Sektor Pertanian dimaksudkan untuk penyelenggaraan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk penyelenggaraan ketahanan pangan dalam hal ini untuk mengkoordinasikan upaya memantapkan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri sekaligus pengurangan jumlah penduduk rawan pangan, sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan petani sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian, dimana dengan semakin tingginya produksi pertanian akan menopang perekonomian masyarakat, sehingga tingkat kesejahteraan petani akan mengalami kenaikan.

Sasaran output dari kegiatan ini adalah (1) Meningkatnya Skor Pola Harapan (PPH), dan (2) Meningkatnya Jumlah Produksi Pertanian, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



**Tabel 3.2**

**Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Petani  
Melalui Peningkatan Produksi Komoditi Potensial Sektor Pertanian**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatnya pemberdayaan petani melalui peningkatan produksi komoditi potensial pertanian sektor	1.	Skor PPH	80,00	82,8	103,50%
		2.	Jumlah Produksi Pertanian :			
		-	Padi Sawah (ton)	27.174,21	17.861,04	65,73%
		-	Padi Ladang (ton)	31.899,70	20.849,80	65,36%
		-	Jagung (ton)	1.171,49	1.526,06	130,27%
		-	Ubi Kayu (ton)	19.377,45	6.675,15	34,45%
		-	Cabe (ton)	245,83	215,73	87,76%
		-	Bawang Merah (ton)	3,86	0,11	2,80%
		-	Jahe (ton)	191,72	129,66	67,63%
		-	Sapi (kilo)	125.555,57	108.660,00	86,54%
		-	Kambing (kilo)	4.010,56	3.696,00	92,16%
		-	Babi (kilo)	78.188,19	60.729,00	77,67%
		-	Ayam Buras (kilo)	54.752,83	84.928,00	155,11%
		-	Ayam Ras Pedaging (kilo)	1.598.670,24	1.580.510,00	98,86%
		-	Ayam Ras Petelur (kilo)	327,31	3.835,00	1171,67%
		-	Itik (kilo)	536,20	967,00	180,34%
		-	Itik manila (kilo)	1.452,68	2.082,00	143,32%
		-	Telur Ayam Buras (kilo)	10.449,18	10.051,46	96,19%
-	Telur Ayam Ras Petelur (kilo)	14.132,57	0,00	0,00%		
-	Kelapa Sawit (ton)	1.162.778,35	398.945,87	34,31%		
-	Karet (ton)	20.980,36	11.155,00	53,17%		
-	Kopi (ton)	1,33	0,82	61,65%		
-	Lada (ton)	13,22	8,95	67,70%		

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2024



Berikut ini adalah Analisis Capaian dari setiap Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Petani Melalui Peningkatan Produksi Komoditi Potensial Sektor Pertanian, jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, dapat dilihat dari beberapa tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1**  
**Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**  
**Dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2023			TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya pemberdayaan petani melalui peningkatan produksi komoditi potensial sektor pertanian	1.	Skor PPH	79,00	87,2	110,38%	80,00	82,8	103,50%

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2024

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan penduduk pada tahun 2024 dimana target 80,00 dengan capaian yaitu sebesar 82,8. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) memperoleh peringkat pertama se – Kalimantan Barat pada Tahun 2023. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ini berarti konsumsi pangan masyarakat mengalami peningkatan keberagaman yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang berarti semakin besar keragaman pangan yang dikonsumsi, maka semakin lengkap nilai gizi yang diperlukan tubuh untuk tetap sehat, aktif dan produktif. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan penduduk di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dampak langsung dari tingginya konsumsi pada beberapa kelompok pangan strategis seperti sayur-sayuran, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/ biji berminyak serta Kacang-kacangan dan gula. Juga pada



kelompok pangan padi-padian yang masih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh pola konsumsi pangan masyarakat, pengetahuan tentang kaidah gizi seimbang yang sudah mulai mengalami peningkatan, meskipun pendapatan keluarga masih ada yang dibawah rata-rata, pengeluaran pangan rumah tangga serta keterjangkauan akses pangan yang masih terbatas. Akan tetapi dengan melakukan intervensi berupa sosialisasi dan pelatihan pengolahan pangan berbasis pangan lokal yang telah banyak dilakukan sehingga berpengaruh sangat signifikan terhadap peningkatan skor PPH konsumsi. Dengan metode inilah yang menyebabkan penyampaian yang sudah mulai mengena ke masyarakat, namun terus dilakukan perumusan kembali terkait metode penyampaian yang sesuai agar skor PPH konsumsi dapat terus meningkat kedepannya.

Dinas Pertanian dan Pangan Khususnya di Bidang Ketahanan Pangan telah berupaya untuk terus meningkatkan konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dengan menjalankan program kegiatan seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), Kegiatan Diversifikasi Pangan, Pengawasan Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan secara berkala, serta Analisis Harga dan Stok Pangan Strategis. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan kerjasama yang baik dari semua pihak stakeholder di Kabupaten Kapuas Hulu untuk bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya tingkat konsumsi pangan masyarakat dalam menjaga komposisi pangan agar hidup lebih sehat dan produktif sehingga mampu terus meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yaitu adanya keterbatasan pemahaman tentang diversifikasi pangan di masyarakat sehingga masih terfokus pada konsumsi beras, namun masyarakat terus diberikan sosialisasi pemahaman terhadap keragaman konsumsi pangan serta bergizi seimbang dan aman.

- Permasalahan

Untuk pelaksanaan tersebut ada permasalahan yang dihadapi yaitu Pemanfaatan cadangan pangan, menjaga stabilitas distribusi dan harga pangan, meningkatkan kecukupan konsumsi energi, protein masyarakat yang



memenuhi kaidah keragaman sumber pangan dan keseimbangan gizi berbasis sumber daya lokal;

- Solusi

Adapun solusi yang di upayakan dalam Pemantapan Ketahanan Pangan daerah menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Sedangkan untuk capaian sasaran Indikator Kinerja Individu (IKI) Kepala Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2024, sebagai berikut:

a. Meningkatnya Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun, dengan indikator Jumlah Angka Konsumsi Pangan :

- Untuk data jumlah Angka Konsumsi Pangan target 2100 KKAL/KAP/Hari dengan realisasi Tahun 2024 yaitu 2.008 KKAL/KAP/Hari.

- Permasalahan

Adapun permasalahan yaitu Belum tercapainya Angka Kecukupan Energi, dan Masih tingginya konsumsi kelompok Padi padian, serta masih rendahnya konsumsi Sayur dan buah sebagai penyumbang Energi/Kap/hari;

- Solusi

Untuk solusi yang di upayakan dinas yaitu : 1. Sosialisasi dan Edukasi Diversifikasi Konsumsi Pangan Pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman dan 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga.

b. Tersedianya data keamanan pangan segar untuk masyarakat, dengan indikator Jumlah pangan segar layak konsumsi :

- Untuk jumlah pangan segar layak konsumsi dengan target 7 jenis realisasi untuk tahun 2024 yaitu 7 jenis dengan capaian target sebesar 100%, hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap bulannya sehingga sudah ada laporan setiap triwulannya;

- Permasalahan



Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu Masih terdapat Pangan yang beredar dipasar tidak layak konsumsi;

- Solusi

Upaya yang dilakukan yaitu Pengujian Secara berkala perlu ditingkatkan.

c. Tersedianya Data dan Informasi Harga Pangan, Situasi Pangan dan Gizi dan Distribusi Pangan, dengan indikator Jumlah data dan informasi Harga Pangan, Situasi Pangan dan Gizi dan Distribusi Pangan :

- Untuk Jumlah data dan informasi Harga Pangan, Situasi Pangan dan Gizi dan Distribusi Pangan dengan target 1 realisasi untuk tahun 2024 yaitu 1 laporan dengan capaian target sebesar 100%;

- Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu Kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana dan target, namun mengingat luas wilayah kabupaten kapuas hulu (23 kecamatan) maka untuk mengumpulkan data-data informasi harga dan situasi pangan memerlukan keterlibatan petugas pertanian di kecamatan yang memerlukan dukungan anggaran, namun sampai saat ini terdapat keterbatasan anggaran sehingga perlu adanya peningkatan anggaran untuk mendukung kegiatan;

- Solusi

Upaya yang dilakukan yaitu peningkatan anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut.



**Tabel 3.2.2**  
**Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Jumlah Produksi Pertanian**  
**Dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya pemberdayaan petani melalui peningkatan produksi komoditi potensial sektor pertanian	1 Skor PPH	79,00	87,2	110,38%	80,00	82,8	103,50%
2 Jumlah Produksi Pertanian :								
-		Padi Sawah (ton)	26.641,38	21.035,00	78,96%	27.174,21	17.861,04	65,73%
-		Padi Ladang (ton)	31.274,22	20.955,00	67,00%	31.899,70	20.849,80	65,36%
-		Jagung (ton)	1.148,52	15.884,00	1383,00%	1.171,49	1.526,06	130,27%
-		Ubi Kayu (ton)	18.997,50	42.248,00	222,39%	19.377,45	6.675,15	34,45%
-		Cabe (ton)	241,01	234,11	97,14%	245,83	215,73	87,76%
-		Bawang Merah (ton)	3,78	0,15	3,97%	3,86	0,11	2,80%
-		Jahe (ton)	187,97	79,06	42,06%	191,72	129,66	67,63%
-		Sapi (kilo)	124.312,45	128.237,00	103,16%	125.555,57	108.660,00	86,54%
-		Kambing (kilo)	3.990,61	3.752,00	94,02%	4.010,56	3.696,00	92,16%
-		Babi (kilo)	77.799,20	51.761,00	66,53%	78.188,19	60.729,00	77,67%
-		Ayam Buras (kilo)	54.589,09	419.625,00	768,70%	54.752,83	84.928,00	155,11%
-		Ayam Ras Pedaging (kilo)	1.590.716,65	1.420.357,00	89,29%	1.598.670,24	1.580.510,00	98,86%
-		Ayam Ras Petelur (kilo)	326,65	1.476,00	451,86%	327,31	3.835,00	1171,67%
-		Itik (kilo)	535,13	859,00	160,52%	536,20	967,00	180,34%
-		Itik manila (kilo)	1.449,78	1.818,00	125,40%	1.452,68	2.082,00	143,32%
-		Telur Ayam Buras (kilo)	10.397,20	10.293,84	99,01%	10.449,18	10.051,46	96,19%
-		Telur Ayam Ras Petelur (kilo)	14.062,26	13325,68	94,76%	14.132,57	0,00	0,00%
-		Kelapa Sawit (ton)	1.139.920,57	1.152.802,50	101,13%	1.162.778,35	398.945,87	34,31%
-	Karet (ton)	20.369,28	12.243,00	60,11%	20.980,36	11.155,00	53,17%	
-	Kopi (ton)	1,29	1,15	89,15%	1,33	0,82	61,65%	
-	Lada (ton)	13,22	10,85	82,07%	13,22	8,95	67,70%	



2	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu	1	Predikat SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan	BB	B	67,65	BB	-	-
---	---	---	---	----	---	-------	----	---	---

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2024

Adapun untuk Capaian Kinerja sasaran sudah ada yang tercapai lebih dari 100%, akan tetapi masih dikategorikan belum bisa dihitung sepenuhnya karena ada sasaran yang belum ada datanya. Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

**a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Realisasi kinerja indikator Peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2024 beberapa komoditas mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2023, hanya komoditas jagung yang mengalami peningkatan cukup signifikan.

Adapun jumlah realisasi produksi tanaman pangan dan hortikultura sampai dengan Tahun 2024 berdasarkan masing-masing komoditi, yaitu sebagai berikut :

**1. Jumlah Produksi Tanaman Pangan**

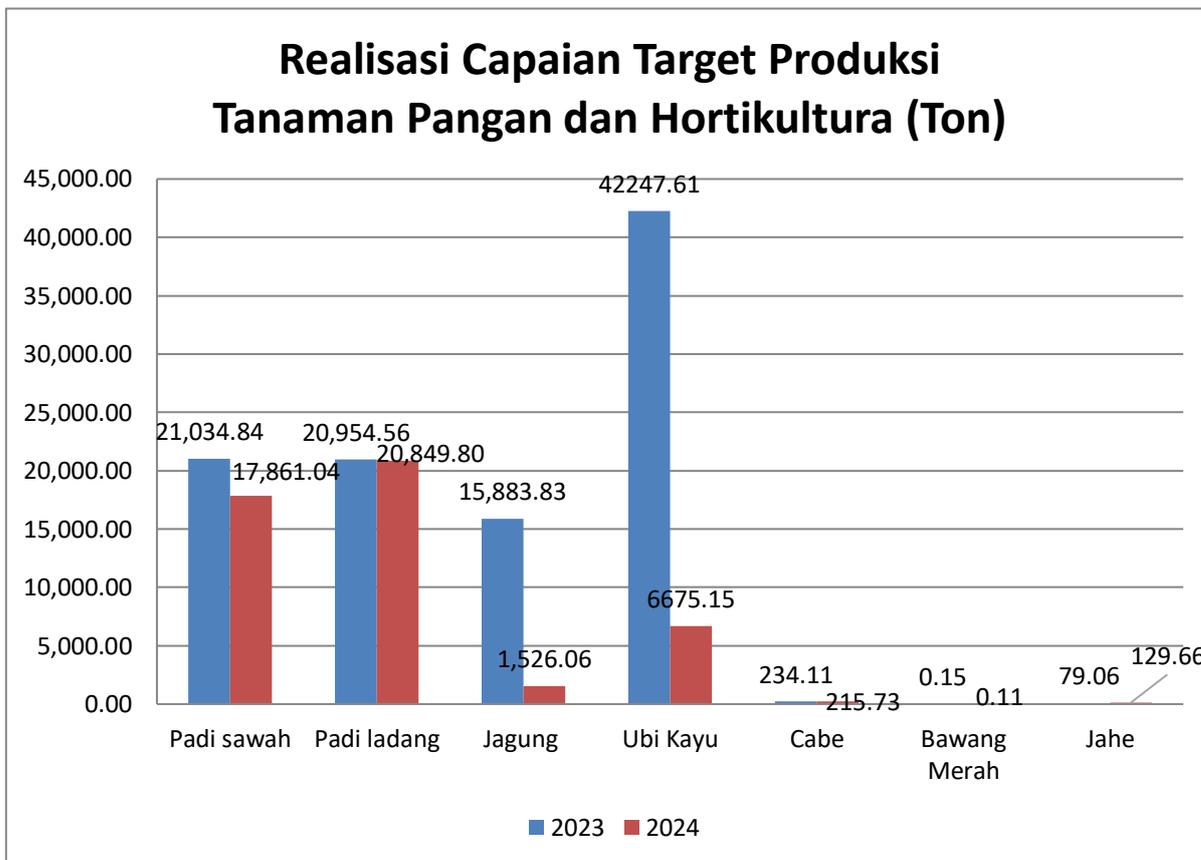
Dengan Target Produksi untuk Padi Sawah 27.174,21 ton, Padi Ladang 31.899,70 ton, Jagung 1.171,49 ton, dan Ubi Kayu 19.377,45 ton tahun 2024. Dimana masing-masing realisasi untuk Padi Sawah yaitu 17.861,04 ton dengan capaian sebesar 65,73%, Padi Ladang yaitu 20.849,80 ton dengan capaian sebesar 65,36%, Jagung yaitu 1.526,06 ton dengan capaian sebesar 130,27%, dan Ubi Kayu yaitu 6.675,15 ton dengan capaian sebesar 34,45%.

**2. Jumlah Produksi Hortikultura**

Dengan target untuk Cabe 245,83 ton, Bawang Merah 3,86 ton dan Jahe 191,72 ton. Dimana masing-masing realisasi untuk Cabe yaitu 215,73 ton dengan capaian sebesar 87,76%, Bawang Merah yaitu 0,11 ton dengan capaian sebesar 2,80 % dan Jahe 129,66 ton dengan capaian sebesar 67,63%.



Berikut ini adalah realisasi capaian target produksi tanaman pangan dan hortikultura tahun 2023-2024, dapat dilihat sebagai berikut:



Dalam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sampai dengan Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu telah berupaya dalam meningkatkan jumlah produksi dalam sektor pertanian di Kabupaten Kapuas Hulu.

- Permasalahan

- a. Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Adapun beberapa kendala atau permasalahan yang menyebabkan terjadinya penurunan atau ketidak berhasilan pencapaian target jumlah produksi tanaman pangan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya produksi total padi tahun 2024 di Kapuas Hulu, disebabkan menurunnya luas panen padi sawah maupun padi



- lading akibat rendahnya realisasi penanaman pada MT.Gadu yang disebabkan oleh adanya banjir;
2. Kendala cuaca karena banjir mengakibatkan lahan jadi tidak bisa dibakar dan ditanami padi sehingga lahan beralih fungsi ke tanaman sawit mandiri;
  3. Pendistribusian Banpem benih padi bulan juli sampai agustus juga tidak bisa ditanami karena lahan terendam oleh banjir;
  4. Akibat perubahan cuaca yang ekstrem dan curah hujan yang tinggi banyak mengakibatkan beralih fungsi lahan dan pergeseran tanam;
  5. Kondisi Cuaca yang kurang stabil dan sejumlah lahan pertanian yang terdampak banjir mengakibatkan pertanaman banyak mati atau mengalami kegagalan panen;
  6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan Luas lahan dan Luas Binaan Penyuluh Pertanian;
  7. Kecenderungannya Masyarakat belum memanfaatkan lahan pertanian secara optimal;
  8. Menurunnya luas panen dan luas tanam dimana pengembangan masih tergantung pada bantuan pemerintah sedangkan petani belum mampu mengembangkan secara swadaya.

Sedangkan untuk beberapa kendala atau permasalahan yang menyebabkan terjadinya penurunan atau ketidakberhasilan pencapaian target jumlah produksi hortikultura tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Cabe
  - Cuaca yang tidak menentu disepanjang tahun 2024 yang menyebabkan tanaman cabe dapat mengalami keekringan dan kebanjiran;
  - Serangan hama penyakit akibat curah hujan yang sangat tinggi;
  - Tingkat kesuburan tanah yang semakin berkurang.
2. Bawang Merah



- Pada tahun 2024 Kapuas Hulu tidak mendapatkan bantuan berupa tanam bawang merah seperti tahu sebelumnya;
- Masih kurangnya minat petani dalam menanam bawang merah dikarenakan benih umbi bawang merah yang sulit didapat;
- Masih kurangnya pengetahuan petani mengenai teknik budidaya bawang merah.

### 3. Jahe

- Kualitas bibit jahe yang masih rendah karena selama ini petani jahe di Kapuas Hulu menggunakan bibit lokal yang mereka peroleh dari panen sebelumnya;
- Teknik budidaya yang belum tepat sehingga mempengaruhi produksi jahe.

Selain itu beberapa kendala atau permasalahan yang menyebabkan terjadinya penurunan atau ketidak berhasilan pencapaian target jumlah produksi hortikultura tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Adanya efek El Nino yang menyebabkan rendahnya curah hujan sehingga tanaman kekurangan air;
2. Terdapat serangan Penyakit Antraknosa (Patrk) akibat curah hujan yang tinggi;
3. Terjadinya banjir di beberapa daerah di Kabupaten Kapuas Hulu seperti di Kecamatan Putussibau Selatan dan Putussibau Utara
4. Efek curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan sebagian areal tanaman seperti jahe terjadi longsor;
5. Menurunnya produksi jahe diakibatkan jahe yang di produksi kecil-kecil dan banyak yang busuk akibat kelembaban terlalu tinggi.

#### • Solusi

##### a. Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Beberapa solusi yang di upayakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dalam meningkatkan jumlah produksi tanaman pangan tahun 2024, yaitu :

1. Berkoordinasi dengan BMKG setempat untuk mengetahui prediksi cuaca yang terjadi sebelum melakukan penanaman;



2. Mempersiapkan rencana penanganan jika terjadi serangan hama dan penyakit apabila masuk musim penghujan;
3. Mempersiapkan rencana penanganan terjadi kekeringan apabila masuk musim kemarau.

Adapun solusi yang diupayakan oleh dinas dalam pencapaian target jumlah produksi hortikultura tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Cabe

- Memberikan bantuan berupa pupukbaik organik maupun kimia;
- Pembinaan guna meingkatkan SDM Petani seperti cara menanggulangi hama penyakit tanaman baik degan mekanis, pestisida nabati atau kimia.

2. Bawang Merah

- Memberikan stimulan berupa bantuan guna mengembangkan kawasan tanaman bawang merah mengingat nila jual komoditi tersebut cukup tinggi;
- Menumbuhkan minat petani untuk membididayakan tanaman bawang merah degan memberikan pengetahuan mengenai teknik budidaya bawang merah sampai kepada analisis usaha taninya.

3. Jahe

- Pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi para petani jahe membeli bibit jahe berkualitas yang bersertifikat sehingga dapat meingkatkan produksi jahe;
- Diharapkan pemerintah dapat memberikan pelatihan-pelatihan terkat budidaya tanam jahe yang baik.

Namun selain beberapa kendala permasalahan tersebut Dinas Pertanian dan Pangan pada tahun 2024 telah berupaya untuk merealisasikan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun beberapa faktor yang mendasari keberhasilan pencapaian target produksi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya luas tanam dan luas panen untuk beberapa komoditi di beberapa kecamatan jika dibandingkan dari tahun sebelumnya;
2. Meningkatnya beberapa komoditi produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kesuburan tanah



dimana unsur hara yang dibutuhkan dapat tercukupi. Selain itu kelembaban tanahnya juga sesuai untuk bercocok tanam jahe dan air yang dibutuhkan juga cukup;

3. Membangun sarana pendukung seperti irigasi, jalan usaha tani dan Prasarana Pertanian Lainnya yang menghubungkan dari areal yang satu dengan areal yang lain guna memudahkan akses bagi petani dalam upaya peningkatan produksi;
4. Melakukan koordinasi yang lebih efektif dengan petani dan melakukan pembinaan serta pendampingan oleh penyuluh pertanian kepada kelompok tani;
5. Mengoptimalkan penggunaan teknologi pertanian sehingga mampu menunjang produktivitas pertanian;
6. Adanya bantuan pemerintah berupa benih sehingga adanya penambahan luas tanam dan panen yang berpengaruh terhadap meningkatnya produksi.

Dalam Mendukung Pelaksanaan dan pencapaian Kinerja peningkatan produksi pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Mengalokasikan 3 Program dan 4 Kegiatan diantaranya adalah :

#### **Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**

1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

#### **Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

#### **Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

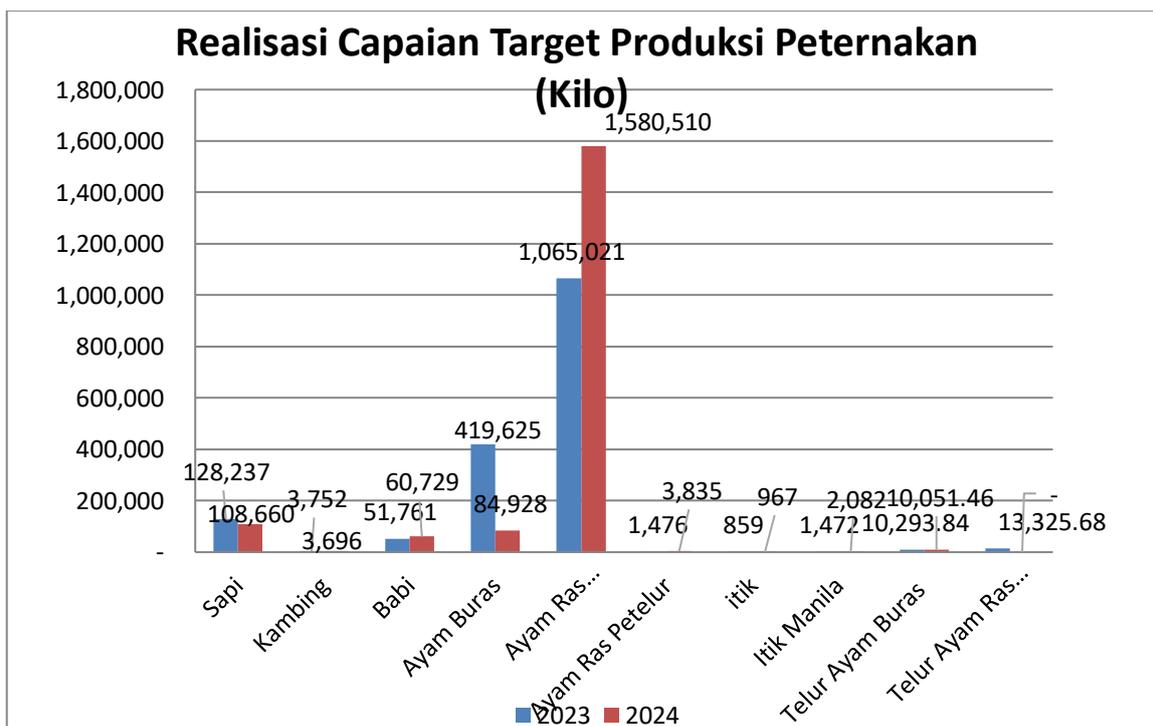


### b. Peningkatan Produksi Peternakan

Produksi ternak tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023, setengah dari jenis ternak mengalami penurunan, kecuali Babi, Ayam Ras Pedaging, Ayam Ras Petelur, Itik dan Itik manila yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2023. Untuk target Produksi masing-masing yaitu Sapi 125.555,57 kg, Kambing 4.010,56 kg, Babi 78.188,19 kg, Ayam Buras 54.752,83 kg, Ayam Ras Pedaging 1.598.670,24 kg, Ayam Ras Petelur 327,31 kg, Itik 536,20 kg, Itik Manila 1.452,68 kg, Telur Ayam Buras 10.449,18 kg, Telur Ayam Ras Petelur 14.132,57 kg.

Adapun masing-masing realisasi yaitu Sapi 108.660,00 kg dengan capaian sebesar 86,54%, Kambing 3.696,00 kg dengan capaian sebesar 92,16%, Babi 60.729,00 kg dengan capaian sebesar 77,67%, Ayam Buras 84.928,00 kg dengan capaian sebesar 155,11%, Ayam Ras Pedaging 1.580.510,00 kg dengan capaian sebesar 98,86%, Ayam Ras petelur 3.835,00 kg dengan capaian sebesar 1171,67%, Itik 967,00 kg dengan capaian sebesar 180,34%, Itik Manila 2.082,00 kg dengan capaian sebesar 143,32%, Telur Ayam Buras 10.051,46 kg dengan capaian sebesar 96,19%, dan Telur Ayam Ras Petelur 0 kg dengan capaian sebesar 0,00 %.

Berikut ini adalah tabel realisasi capaian target produksi peternakan tahun 2023-2024 :





Pada tahun 2024 terjadi penurunan produksi pada setengah jenis ternak (Sapi, Kambing, Ayam Buras, Telur Ayam Buras dan Telur Ayam Ras Petelur) dibandingkan produksi tahun 2023. Kecuali ternak Babi, Ayam Ras Pedaging, Ayam Ras Petelur, Itik dan Itik manila yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

- Permasalahan dan Solusi

Adapun beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi bidang peternakan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dalam pencapaian produksi ternak sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Sapi

- Terjadi penurunan jumlah pemotongan sapi di beberapa wilayah potensi ternak sapi, seperti Batang Lupar, Bika, Embaloh Hilir, Embaloh Hulu, Empanang, Puring Kencana, Seberuang, Silat Hulu dan Suhaid. Berdasarkan laporan data statistik dari mantra tani tahun 2024;
- Pengawasan pemotongan ternak sapi oleh Pengawas kesmavet ( Dokter Hewan ) dan Petugas Kesmavet (Kesehatan masyarakat veteriner) yang berada di Kabupaten hanya terpusat di beberapa Tempat Pemotongan Hewan (TPH) Putussibau Utara dan Putussibau Selatan, sementara kecamatan lain hanya dilakukan oleh Mantri Tani, sehingga tidak sedikit pemotongan yang dilakukan oleh peternak yang tidak diketahui oleh Mantri Tani untuk dilaporkan ke petugas pengumpul dan pengolah data peternakan di Kabupaten;
- Tingginya harga jual daging sapi, merupakan salah satu penyebab daya beli masyarakat yang terbatas sehingga beralih ke protein hewani lainnya, seperti daging ayam, ikan, telur dsb;
- Adanya daging kerbau beku yang harganya relatif lebih murah merupakan alternative pengganti daging sapi segar yang dipilih masyarakat.
- Adanya pelanrangan pemotongan sapi betina produktif sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 86 sebagai berikut:



“Setiap orang yang meyembelih ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.00,- (tiga ratus juta rupiah), sehugga hanya ternak sapi jantan atau ternak sapi betina tidak produktif saja yang diperoleh untuk di potong. Pengawasan pelarangan pemotongan ternak sapi betina produktif di Kabupaten Kapuas Hulu (khusus Putussibau Utara dan Putussibau Selatan) dilakukan oleh Pengawas dan Petugas Kesmavet serta dari pihak Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Prvinsi Kalimantan Barat. Hal ini meyebabkan sapi jantan sulit dicari dan harga ditingkat peternak menjadi lebih tinggi.

## 2. Kambing

- Untuk populasi ternak kambing di Kabupaten Kapuas Hulu memang lebih sedikit di bandingkan ternak lainnya, hal ini mengakibatkan ternak kambing harus didatangkan dari luar kabupaten untuk memenuhi permintaan konsumen dari Kabupaten Kapuas Hulu, terutama untuk qurban, aqiqah atau khitanan.
- Adanya ketentuan persyaratan dalam Standar Pelayanan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, yang mengacu pada :
  - Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014;
  - Undang-Undang No. 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan;
  - Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2007 tentang pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan daerah kabupaten/Kota;
  - Peraturan Daerah No. 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kalimantan Barat;



- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No.141 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Hal tersebut menyebabkan pemasukan ternak kambing oleh pelaku usaha ke Kabupaten Kapuas Hulu menjadi terbatas. Mahalnya harga ternak kambing di tingkat peternak menyebabkan masyarakat lebih memilih ternak sapi untuk hewan qurban atau membeli/mendatangkan daging kambing segar yang sudah dipotong di Pontianak atau daerah lainnya untuk Aqiqah atau khitanan.

### 3. Babi

- Adanya penyakit ASF ( African Swine Fever (ASF) yang merupakan penyakit pada babi dan sangat menular, menyebabkan kematian hingga 100% sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Penyakit ini mulai masuk dan menyebar ke Kabupaten Kapuas Hulu pada pertengahan tahun 2021.
- Adanya penyakit tersebut menyebabkan sulitnya pemasukan dan atau pengeluaran ternak babi dari dan dalam kabupaten. Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat No. 440/0886/KESRA-B tanggal 12 Maret 2021 dan Surat Edaran Bupati Nomor 524.31/2460/DISTAN/2021 tanggal 13 September 2021 terkait pengendalian terhadap penyebaran penyakit menular pada ternak babi di kabupaten Kapuas Hulu serta Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor 524.3/2461/DISTAN/PTR-B tanggal 13 September 2021 kepada camat perihal Penutupan Lalu Lintas Ternak Babi/babi hutan beserta karkasnya dan hasil ikutan lainnya.
- Sulitnya mendapatkan ternak babi yang sehat dan bebas penyakit ASF mengakibatkan harga jual ternak babi yang tinggi sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat
- Adanya kekhawatiran masyarakat bahwa penyakit ASF akan menular kepada manusia setelah mengkonsumsi daging babi, hal ini tentu saja mempengaruhi pemotongan ternak babi yang akan dijual ke masyarakat.



#### 4. Ayam Buras

Terjadi peningkatan yang sangat signifikan untuk jumlah pemotongan ayam buras di tahun 2024, hal ini disebabkan antara lain :

- Sebagian besar masyarakat beternak ayam buras karena mudah dalam pemeliharaan;
- Sejak adanya penyakit ASF di pertengahan tahun 2021 yang mana banyak ternak babi masyarakat yang mati, maka untuk memenuhi kebutuhan daging pada acara-acara tertentu seperti pesta panen atau gawai adat, masyarakat memilih alternatif ayam buras sebagai pengganti babi, sehingga pemotongan ayam buras meningkat tajam.

#### 5. Ayam Ras Pedaging

- Adanya harga daging ayam ras pedaging (ayam potong) yang kurang stabil menyebabkan banyak konsumen beralih ke daging ayam beku yang harganya realtif lebih stabil dan terjangkau, hal ini menyebabkan jumlah pemotongan berkurang.
- Harga daging ayam ras pedaging (ayam potong) yang kurang stabil dikarenakan adanya kenaikan di pakan ternak.

#### 6. Ayam Ras Petelur dan Itik Petelur

Terjadi peningkatan yang sangat signifikan untuk jumlah produksi ayam ras dan itik petelur di tahun 2024. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi, sebagai berikut:

- Pemotongan dan atau penjualan ternak ayam atau itik petelur hanya dilakukan jika kondisi ayam atau itik petelur sudah kurang berproduksi karena umurnya sudah melewati batas produksi maksimal ( sekitar 1,5 s/d 2 tahun ) atau karena ayam atau itik petelur sakit. Pada tahun 2024 banyak ayam ras petelur dan itik petelur yang sudah kurang berproduksi, sehingga lebih banyak di potong atau di jual untuk diambil dagingnya.

#### 7. Itik Manila



Terjadi peningkatan yang sangat signifikan untuk jumlah produksi itik manila di tahun 2024. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi, sebagai berikut:

- Pemotongan dan atau penjualan ternak itik manila biasanya hanya dilakukan sepanjang ada pemesanan dari pembeli/konsumen, karena tidak banyak masyarakat yang senang mengkonsumsi itik/bebek manila.

Dari Data Produksi Peternakan tahun 2024, hanya ternak seperti ayam ras pedaging yang mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan, dari 1.420.357,00 (tahun 2023) naik/meningkat menjadi 1.580.510,00 (tahun 2024), hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain sebagai berikut :

- Pemeliharaan yang lebih singkat mengakibatkan banyak peternak yang megusahakan ayam ras pedaging (ayam potong);
- Harga daging ayam potong yang relative stabil dan terjangkau masyarakat mengakibatkan masyarakat cenderung memilih daging ayam potong sebagai protein hewani untuk konsumsi keluarga dibanding daging sapi, daging kambing atau yang lainnya;
- Daging ayam potong cenderung lebih disukai anak-anak, sehingga banyak orangtua/ ibi-ibu yang lebih memilih daging ayam potong.

Dalam upaya mendukung peningkatan jumlah populasi ternak, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu mengalokasikan 2 Program dan 8 Kegiatan diantaranya adalah :

#### **Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**

1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
4. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah



Kabupaten/Kota Lain

5. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

**c. Produksi Perkebunan**

Realisasi capaian kinerja jumlah produksi perkebunan tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dan juga kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari pencapaian target kinerja untuk tahun 2024. Untuk Target Produksi Kelapa Sawit 1.162.778,35 ton, Karet 20.980,36 ton, Kopi 1,33 ton dan Lada 13,22 ton.

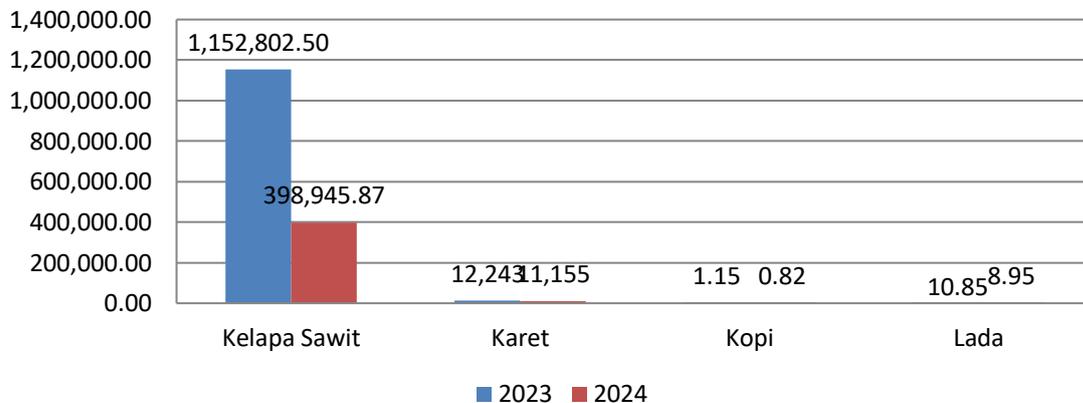
Adapun masing-masing realisasi yaitu untuk Kelapa Sawit yaitu 398.945,87 ton dengan capaian sebesar 34,31%, Karet 11.155,00 ton dengan capaian sebesar 53,17%, Kopi 0,82 ton dengan capaian sebesar 61,65% sedangkan Lada 8,95 ton dengan capaian sebesar 67,70%.

Mengingat Kelapa Sawit merupakan komoditas perkebunan yang merupakan Pendapatan Asli Daerah yang menyumbang pendapatan cukup tinggi. Sebagai upaya Dinas Pertanian dan Pangan akan terus mendorong peningkatan produksi perkebunan dalam mengembangkan komoditas yang ada sehingga target yang untuk kedepannya bisa lebih optimal.

Berikut ini adalah realisasi capaian target produksi perkebunan tahun 2023-2024:



### Realisasi Capaian Target Produksi Perkebunan (Ton)



Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang merupakan Pendapatan Asli Daerah yang menyumbang pendapatan cukup tinggi, meskipun data jumlah produksi kelapa sawit untuk tahun 2024 menurun dari tahun sebelumnya, akan tetapi tren penjualan Kelapa Sawit cukup baik, dengan adanya kegiatan verifikasi Usulan Indeks “K” yang dilakukan setiap bulan untuk memastikan harga bagi petani dapat diawasi oleh pemerintah. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya jumlah produksi karet juga masih mengalami penurunan, hal ini dikarenakan tren yang terjadi sekarang ini dimana harga karet masih belum stabil atau cenderung mengalami penurunan serta kebun karet banyak yang sudah tua atau rusak. Masyarakat juga sudah mulai meninggalkan karet dan menggantinya dengan komoditas lain yang lebih menjanjikan seperti kratom. Untuk Komoditas yang lain seperti Kopi mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya akan tetapi masih belum mencapai target 100%, hal ini dikarenakan komoditas kopi masih belum menjanjikan dalam hal pemasaran dan memiliki masa panen yang cukup lama sehingga masyarakat kurang bersemangat untuk mengembangkan komoditas kopi.

Namun sebagai Upaya Dinas Pertanian dan Pangan akan terus mendorong untuk pengembangan kopi ini dikarenakan komoditas kopi memiliki prospek yang cukup bagus untuk dikembangkan. Sedangkan untuk



komoditas ladasama seperti tahun-tahun sebelumnya juga mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini dikarenakan harga lada yang turun dan tidak stabil, sehingga sedikit petani yang bisa membeli pupuk untuk penyubur buah. Akan tetapi Dinas Pertanian dan Pangan terus berupaya meningkatkan produksi Lada, mengingat jumlah produksi lada sendiri yang cukup naik dan harga pasar penjualan lada yang cukup baik.

Adapun beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu di Bidang Perkebunan dalam mencapai target untuk komoditas Kelapa Sawit, Karet, Kopi dan Lada yaitu :

1. Bibit tidak unggul yang ditanam masyarakat pekebun;
2. Perkebunan rakyat tidak pernah memperoleh bantuan sarana produksi (pupuk dan racun rumput);
3. Mahalnya harga pupuk dan racun rumput dipasaran; dan
4. Cuaca yang tidak menentu.

Beberapa solusi atau upaya yang akan dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu di Bidang Perkebunan dalam meningkatkan capaian target untuk komoditas Kelapa Sawit, Karet, Kopi dan Lada yaitu :

1. Masyarakat pekebun harus menggunakan bibit unggul dalam usaha perkebunannya; dan
2. Perlu adanya bantuan sarana produksi (pupuk dan racun rumput dan bibit unggul dari pemerintah.

Dalam mendukung peningkatan jumlah produksi perkebunan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu mengalokasikan 4 Program, 4 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan diantaranya adalah :

#### **Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**

##### **1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Sub Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung kegiatan Pertanian lainnya

#### **Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

##### **1. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**

Sub Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Jalan Usaha kegiatan Tani



Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

### **Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin usaha Pertanian

### **Program Perizinan Usaha Pertanian**

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

#### **d. Meningkatnya Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian**

Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian menjadi dasar pencapaian target kinerja pada Bidang Penyuluhan, yang dituangkan dalam program kegiatan dalam rangka mendukung upaya peningkatan kesejahteraan petani dari sisi kapasitas kelembagaan petaninya. Bidang Penyuluhan mempunyai indikator penilaian terhadap kelompok tani, melalui kelas kelompok.

Adapun kelas kelompok yaitu jumlah Kelompok Tani Kelas Madya dengan target 3 kelompok dan jumlah Kelompok Tani Kelas Lanjut dengan target 5 kelompok, tahun 2024 capaiannya meningkat secara signifikan dengan realisasi masing-masing untuk Kelompok tani kelas Madya dengan target 3 kelompok realisasinya yaitu 10 kelompok capaian sebesar 0,63% dan jumlah Kelompok tani kelas Lanjut dengan target 5 kelompok realisasinya yaitu 331 kelompok dengan capaian sebesar 21,00%.

- Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dinas, yaitu:

- Masih rendahnya pemahaman pengurus Poktan tentang fungsi dan peran organisasi poktan dan ;
- Terbatasnya anggaran pembinaan terhadap kelompok tani.



- Solusi

Adapun solusi serta upaya yang dilakukan dinas, yaitu:

- Mengoptimalkan pendampingan dan pembinaan oleh penyuluh pertanian lapangan dan;
- Mengoptimalkan dinamika kepengurusan kelompok tani.

Dalam mendukung Meningkatkan Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu mengalokasikan 1 Program, 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan diantaranya adalah :

### **Program Penyuluhan Pertanian**

#### **1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**

Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

### **Sasaran 2 :**

“Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah“

Dalam penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi. Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan anggaran serta peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator Nilai Reformasi Birokrasi dan Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Adapun nilai (skor) akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan evaluasi penyelenggaraan RB dan SAKIP yang dilaksanakan Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyelenggaraan RB dan SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.



Untuk mengetahui akuntabilitas dari kinerja instansi pemerintah dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara periodik wajib disusun oleh setiap instansi pemerintah dan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan saat ini sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka masyarakat juga berhak mengetahui akuntabilitas kinerja dari suatu instansi pemerintah.

Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, melalui visi dan misi Bupati Kapuas Hulu 2021-2026. Serta dengan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government), sasaran strategis yaitu terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan yang tertuang kedalam dokumen rancangan awal Renstra Tahun 2021-2026 sesuai dengan indeks perencanaan pembangunan daerah.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu terus menerus dilakukan, mulai dari menyempurnakan sistem akuntabilitas kinerja, menyusun dan menerapkan sistem manajemen kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja, sistem monitoring dan evaluasi, sampai kepada penyusunan indikator kinerja.

Adapun analisis capaian kinerja sasaran Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

**Tabel 3.3**  
**Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Predikat SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu	BB	-	-
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>					-

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2024



Sasaran strategis untuk Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi (RB) dan Predikat SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun 2024 dengan target untuk Nilai Predikat SAKIP yaitu BB belum ada realisasi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan penilaian untuk Nilai Predikat SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 baru akan dilaksanakan di tahun ini (2025) menunggu Review SAKIP oleh TIM SAKIP Kabupaten dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Inspektur Pembantu IV, sesuai dengan ketentuan yang ada. Diharapkan dalam pelaksanaan meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan dapat mengembangkan budaya kerja dan etos kerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya, sehingga Birokrasi Pemerintahan yang ditargetkan ditahun 2024 ini dapat tercapai dengan baik sesuai dengan nilai yang ingin dicapai.

Namun upaya tersebut perlu dukungan dan Kerjasama berbagai pihak sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan dapat kita wujudkan bersama. Sampai dengan periode evaluasi tahun 2024 bahwa masih terdapat beberapa kendala permasalahan dalam pelaksanaan perubahan birokrasi reformasi, hal ini ditunjukkan dengan masih lemahnya dalam mendokumentasikan beberapa kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan reformasi birokrasi, tentunya ke arah yang lebih baik. Namun disisi lain terdapat banyak sekali kemajuan yang telah dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan dalam Disiplin aparatur dan Pengembangan Sumber daya manusia termasuk kaitannya dalam perencanaan target kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yang menjadi dasar kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkup Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.

Keberhasilan dari Pencapaian Kinerja Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih bersih dan profesional dengan target indikator yang berorientasi hasil. Adapun beberapa kemungkinan faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah tersebut adalah :



- a. Pelaksanaan Review Rencana Strategis tahun 2021-2026 dengan melakukan perubahan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan dengan mengacu pada visi dan misi Bupati Kapuas Hulu;
- b. Pelaksanaan Review Indikator Kinerja Utama dengan penetapan Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Pejabat Pengawas ( eselon IV) dan Pejabat Fungsional;
- d. Penyusunan Rencana Aksi Atas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
- e. Pelaksanaan Pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan per triwulan.

Dalam rangka Pencapaian Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentunya masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa Kendala tersebut antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas perencanaan strategis;
2. Indikator Kinerja Utama masih belum berorientasi hasil (outcome);
3. Masih rendahnya capaian penilaian mandiri terhadap implementasi Reformasi Birokrasi untuk pelaksanaan pada 8 area perubahan RB;
4. Masih lemahnya dalam mendokumentasikan beberapa kegiatan yang merupakan pendukung kegiatan reformasi birokrasi, tentunya ke arah yang lebih baik;
5. Belum ada keselarasan antara Indikator Kinerja Utama OPD dengan IKU Pemerintah Kabupaten;
6. Cascading dan pohon kinerja masih belum sinkron dengan kinerja pejabat di atasnya sebagai turunan;
7. Masih kurangnya ketercukupan informasi kinerja sebagai dasar penyusunan pelaporan kinerja serta tindak lanjut permasalahanan;
8. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang tidak berorientasi kepada pencapaian sasaran strategis.

Berikut ini Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, dapat dilihat pada Tabel 3.4 yaitu sebagai berikut :



Tabel 3.4  
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran  
Dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya pemberdayaan petani melalui peningkatan produksi komoditi potensial sektor pertanian	1. Skor PPH	79,00	87,2	110,38%	80,00	82,8	103,50%
		2. Jumlah Produksi Pertanian :						
		- Padi Sawah (ton)	26.641,38	21.035,00	78,96%	27.174,21	17.861,04	65,73%
		- Padi Ladang (ton)	31.274,22	20.955,00	67,00%	31.899,70	20.849,80	65,36%
		- Jagung (ton)	1.148,52	15.884,00	1383,00%	1.171,49	1.526,06	130,27%
		- Ubi Kayu (ton)	18.997,50	42.248,00	222,39%	19.377,45	6.675,15	34,45%
		- Cabe (ton)	241,01	234,11	97,14%	245,83	215,73	87,76%
		- Bawang Merah (ton)	3,78	0,15	3,97%	3,86	0,11	2,80%
		- Jahe (ton)	187,97	79,06	42,06%	191,72	129,66	67,63%
		- Sapi (kilo)	124.312,45	128.237,00	103,16%	125.555,57	108.660,00	86,54%
	- Kambing (kilo)	3.990,61	3.752,00	94,02%	4.010,56	3.696,00	92,16%	



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KAPUAS HULU  
HEBAT!**

		- Babi (kilo)	77.799,20	51.761,00	66,53%	78.188,19	60.729,00	77,67%
		- Ayam Buras (kilo)	54.589,09	419.625,00	768,70%	54.752,83	84.928,00	155,11%
		- Ayam Ras Pedaging (kilo)	1.590.716,65	1.420.357,00	89,29%	1.598.670,24	1.580.510,00	98,86%
		- Ayam Ras Petelur (kilo)	326,65	1.476,00	451,86%	327,31	3.835,00	1171,67%
		- Itik (kilo)	535,13	859,00	160,52%	536,20	967,00	180,34%
		- Itik manila (kilo)	1.449,78	1.818,00	125,40%	1.452,68	2.082,00	143,32%
		- Telur Ayam Buras (kilo)	10.397,20	10.293,84	99,01%	10.449,18	10.051,46	96,19%
		- Telur Ayam Ras Petelur (kilo)	14.062,26	13325,68	94,76%	14.132,57	0,00	0,00%
		- Kelapa Sawit (ton)	1.139.920,57	1.152.802,50	101,13%	1.162.778,35	398.945,87	34,31%
		- Karet (ton)	20.369,28	12.243,00	60,11%	20.980,36	11.155,00	53,17%
		- Kopi (ton)	1,29	1,15	89,15%	1,33	0,82	61,65%
		- Lada (ton)	13,22	10,85	82,07%	13,22	8,95	67,70%
<b>2</b>	<b>Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu</b>	<b>1.</b>	<b>Predikat SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan</b>	<b>BB</b>	<b>B</b>	<b>67,65</b>	<b>BB</b>	<b>-</b>

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2024



## B. Realisasi Anggaran

### 1. Analisis Penggunaan Sumberdaya Keuangan

Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2024 mengalami rasionalisasi anggaran yang disebabkan oleh bertambahnya kebijakan pimpinan dan pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu bertambah sebesar Rp 9.636.586.052,- maka anggaran setelah APBD Perubahan sebesar Rp 60.735.281.767,- yang terdiri dari 10 program, 26 kegiatan dan 69 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 59.285.844.133,- dengan capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 97,61%.

Adapun hasil kinerja program/kegiatan/sub kegiatan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 telah memenuhi target yang direncanakan. Akan tetapi masih terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja dan juga terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Untuk merealisasikan dan mencapai target-target dan sasaran melalui pencapaian terget indikator kinerja utama bagaimana tercantum dalam penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :



**PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2024  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		
		ANGGARAN TAHUN 2024 (RP)	RATA-RATA	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>311.356.400</b>	<b>310.124.422</b>	<b>99,60%</b>
	<b>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>148.813.200</b>	<b>148.415.622</b>	<b>99,73%</b>
	1 Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	51.020.200	50.680.300	99,33%
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	0,00%
	3 Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	81.675.000	81.649.722	99,97%
	4 Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	16.118.000	16.085.600	99,80%
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>74.350.000</b>	<b>73.546.600</b>	<b>98,92%</b>
	1 Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	74.350.000	73.546.600	98,92%
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>88.193.200</b>	<b>88.162.200</b>	<b>99,96%</b>
	1 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	88.193.200	88.162.200	99,96%



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA**  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KAPUAS HULU**  
**HEBAT!**

<b>2</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>		<b>26.837.800</b>	<b>26.664.400</b>	<b>99,35%</b>
	<b>Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>		<b>26.837.800</b>	<b>26.664.400</b>	<b>99,35%</b>
1	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		26.837.800	26.664.400	99,35%
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>		<b>26.806.500</b>	<b>26.775.100</b>	<b>99,88%</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>26.806.500</b>	<b>26.775.100</b>	<b>99,88%</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		26.806.500	26.775.100	99,88%
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>23.884.404.667</b>	<b>23.419.092.042</b>	<b>98,05%</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>308.520.900</b>	<b>307.259.700</b>	<b>99,59%</b>
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		76.962.500	76.287.300	99,12%
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		4.972.000	4.972.000	100,00%
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		10.661.000	10.661.000	100,00%
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		14.297.000	14.297.000	100,00%
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		13.454.000	13.454.000	100,00%
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		56.948.000	56.948.000	100,00%
7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		131.226.400	130.640.400	99,55%
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>17.280.184.600</b>	<b>16.840.755.312</b>	<b>97,46%</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		16.795.469.000	16.372.226.712	97,48%
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		391.090.000	374.903.000	95,86%
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		50.658.600	50.658.600	100,00%



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA**  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KAPUAS HULU**  
**HEBAT!**

4	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	42.967.000	42.967.000	100,00%
<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>168.980.000</b>	<b>168.850.000</b>	<b>99,92%</b>
1	Sub Kegiatan	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	67.575.000	67.565.000	99,99%
2	Sub Kegiatan	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	54.205.000	54.105.000	99,82%
3	Sub Kegiatan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	47.200.000	47.180.000	99,96%
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>174.477.000</b>	<b>166.685.827</b>	<b>95,53%</b>
1	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	
2	Sub Kegiatan	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	130.663.000	129.611.000	99,19%
3	Sub Kegiatan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43.814.000	37.074.827	84,62%
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>1.782.510.000</b>	<b>1.781.755.664</b>	<b>99,96%</b>
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.473.400	51.473.400	100,00%
2	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.450.000	81.450.000	100,00%
3	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	108.899.200	108.874.200	99,98%
4	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.662.000	17.662.000	100,00%
5	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	24.000.000	100,00%
6	Sub Kegiatan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000.000	24.000.000	100,00%
7	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.463.025.400	1.462.296.064	99,95%
8	Sub Kegiatan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.000.000	12.000.000	100,00%



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KAPUAS HULU  
HEBAT!**

	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>171.000.000</b>	<b>170.918.300</b>	<b>99,95%</b>
1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.000.000	71.000.000	100,00%
2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	99.918.300	99,92%
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.479.370.324</b>	<b>2.465.745.795</b>	<b>99,45%</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.480.000	10.480.000	100,00%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	166.668.000	160.054.582	96,03%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.302.222.324	2.295.211.213	99,70%
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.519.361.843</b>	<b>1.517.121.444</b>	<b>99,85%</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	547.481.843	546.319.504	99,79%
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.880.000	59.880.000	100,00%
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	912.000.000	910.921.940	99,88%
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>810.686.000</b>	<b>648.086.790</b>	<b>79,94%</b>
	<b>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>633.011.000</b>	<b>472.187.320</b>	<b>74,59%</b>
1	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	483.011.000	472.187.320	97,76%
2	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	150.000.000	-	0,00%
	<b>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>83.066.000</b>	<b>88.856.100</b>	<b>106,97%</b>



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KAPUAS HULU  
HEBAT!**

	1	Sub Kegiatan	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	52.816.000	52.511.100	99,42%
	2	Sub Kegiatan	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	30.250.000	36.345.000	120,15%
			<b>Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>26.421.200</b>	<b>19.812.255</b>	<b>74,99%</b>
	1	Sub Kegiatan	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	14.336.500	8.033.085	56,03%
	2	Sub Kegiatan	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	12.084.700	11.779.170	97,47%
			<b>Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.554.965</b>	<b>99,36%</b>
	1	Sub Kegiatan	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	1.565.000	1.554.965	99,36%
			<b>Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>66.622.800</b>	<b>65.676.150</b>	<b>98,58%</b>
	1	Sub Kegiatan	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	66.622.800	65.676.150	98,58%
<b>6</b>			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>34.480.578.000</b>	<b>33.679.046.770</b>	<b>97,68%</b>
			<b>Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>1.061.906.000</b>	<b>797.262.800</b>	<b>75,08%</b>
	1	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	835.378.400	772.285.200	92,45%
	2	Sub Kegiatan	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	-	-	0,00%
	3	Sub Kegiatan	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	-	-	0,00%



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA**  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KAPUAS HULU**  
**HEBAT!**

	4	Sub Kegiatan	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	226.527.600	24.977.600	11,03%
			<b>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>33.418.672.000</b>	<b>32.881.783.970</b>	<b>98,39%</b>
	1	Sub Kegiatan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	-	-	
	2	Sub Kegiatan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	28.181.456.000	27.650.144.070	98,11%
	3	Sub Kegiatan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	-	-	
	4	Sub Kegiatan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	315.540.000	313.898.000	99,48%
	5	Sub Kegiatan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	4.921.676.000	4.917.741.900	99,92%
7			<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>533.435.000</b>	<b>530.022.589</b>	<b>99,36%</b>
			<b>Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>488.030.000</b>	<b>485.098.740</b>	<b>99,40%</b>
	1	Sub Kegiatan	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	36.250.000	36.138.880	99,69%
	2	Sub Kegiatan	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	451.780.000	448.959.860	99,38%
			<b>Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.359.470</b>	<b>99,37%</b>
	1	Sub Kegiatan	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	6.400.000	6.359.470	99,37%
			<b>Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>39.005.000</b>	<b>38.564.379</b>	<b>98,87%</b>



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KAPUAS HULU  
HEBAT!**

	1	Sub Kegiatan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	16.088.000	15.786.590	98,13%
	2	Sub Kegiatan	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	22.917.000	22.777.789	99,39%
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>			<b>39.619.800</b>	<b>32.856.200</b>	<b>82,93%</b>
	<b>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>			<b>39.619.800</b>	<b>32.856.200</b>	<b>82,93%</b>
	1	Sub Kegiatan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.250.000	2.245.000	99,78%
	2	Sub Kegiatan	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	35.770.800	29.062.200	81,25%
	3	Sub Kegiatan	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.599.000	1.549.000	96,87%
<b>9</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>			<b>71.557.600</b>	<b>70.939.520</b>	<b>99,14%</b>
	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>71.557.600</b>	<b>70.939.520</b>	<b>99,14%</b>
	1	Sub Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	71.557.600	70.939.520	99,14%
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>			<b>550.000.000</b>	<b>542.236.300</b>	<b>98,59%</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>			<b>550.000.000</b>	<b>542.236.300</b>	<b>98,59%</b>
	1	Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	277.531.000	270.831.000	97,59%
	2	Sub Kegiatan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	272.469.000	271.405.300	99,61%
<b>JUMLAH</b>				<b>60.735.281.767</b>	<b>59.285.844.133</b>	<b>97,61%</b>

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2024



Sasaran yang mendapat alokasi dana terbesar adalah sasaran 1 yaitu Meningkatkan pemberdayaan petani melalui peningkatan produksi komoditi potensial sektor pertanian, selanjutnya adalah sasaran 2 yaitu Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu. Hal ini dikarenakan dalam alokasi anggaran sasaran Meningkatkan pemberdayaan petani melalui peningkatan produksi komoditi potensial sektor pertanian terdapat program dan kegiatan yang merupakan anggaran bantuan serta pokir-pokir yang bersumber dari APBD/APBN serta untuk sasaran Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu terdapat program dan kegiatan yang merupakan anggaran operasional rutin kantor yang harus ada setiap tahunnya dan sebagai penunjang utama bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk terwujudnya pelayanan yang baik dan berkualitas

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu masih belum bisa merealisasikan seluruh target kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan atau rata-rata capaian kinerja sebesar 125,1%, sedangkan pada aspek anggaran yang dibelanjakan mencapai 97,61% dimana penyerapan anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 59.285.844.133,- dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 60.735.281.767,-. Dengan demikian, capaian hasil / output lebih kecil dari inputnya dan termasuk dalam kategori kurang efisien.

Berikut adalah rincian penggunaan anggaran per program per kegiatan adalah sebagai berikut :

a. URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN

1. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp. 51.020.200,- dan terealisasi Rp.



50.680.300,- atau sebesar 99,33%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan untuk kegiatan kantor lainnya, belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa dan belanja perjalanan dinas.

- Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan, anggaran sebesar Rp. 81.675.000,- dan terealisasi Rp. 81.649.722,- atau sebesar 99,97%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer dan belanja perjalanan dinas.
- Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), anggaran sebesar Rp. 16.118.000,- dan terealisasi Rp. 16.085.600,- atau sebesar 99,80%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer dan belanja perjalanan dinas.

Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp. 74.350.000,- dan terealisasi Rp. 73.546.600,- atau sebesar 98,92%. Dana tersebut digunakan untuk belanja barang pakai habis, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer, belanja jasa, belangan sewa peralatan dan mesin dan belanja perjalanan dinas.



Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, anggaran sebesar Rp. 88.193.200,- dan terealisasi Rp. 88.162.200,- atau sebesar 99,96%. Dana tersebut digunakan untuk belanja barang pakai habis seperti belanja bahan-bahan/bibit tanaman, belanja-bahan lainnya belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer, belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa, belanja sewa peralatan dan mesin dan belanja perjalanan dinas.

## 2. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, anggaran sebesar Rp. 26.837.800,- dan terealisasi Rp. 26.664.400,- atau sebesar 99,35%. Dana tersebut digunakan untuk belanja barang pakai habis seperti belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer, belanja makanan dan minuman rapat, dan belanja perjalanan dinas.

## 3. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp. 26.806.500,- dan terealisasi Rp. 26.775.100,- atau sebesar 99,88%. Dana tersebut digunakan untuk belanja barang pakai habis



seperti belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer, belanja makanan dan minuman rapat, dan belanja perjalanan dinas.

b. URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp. 76.962.500,- dan terealisasi Rp. 76.287.300,- atau sebesar 99,12%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat dan perjalanan dinas.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, anggaran sebesar Rp. 4.972.000,- dan terealisasi Rp. 4.972.000,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat .
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD, anggaran sebesar Rp. 10.661.000,- dan terealisasi Rp. 10.661.000,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat.
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, anggaran sebesar Rp. 14.297.000,- dan terealisasi Rp. 14.297.000,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja



- alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat .
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, anggaran sebesar Rp. 13.454.000,- dan terealisasi Rp. 13.454.000,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat .
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran sebesar Rp. 56.948.000,- dan terealisasi Rp. 56.948.000,- atau sebesar 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer dan perjalanan dinas.
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp. 131.226.400,- dan terealisasi Rp. 130.640.400,- atau sebesar 99,55%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat dan perjalanan dinas.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran tersedia sebesar Rp. 16.795.469.000,- dan terealisasi Rp. 16.372.226.712,- atau 97,48%. Dana tersebut digunakan untuk belanja gaji pokok PNS, belanja gaji pokok PPPK, belanja tunjangan keluarga PNS, belanja tunjangan keluarga PPPK, belanja tunjangan jabatan PNS, belanja tunjangan fungsional PNS, belanja tunjangan fungsional umum PNS, belanja tunjangan fungsional umum PPPK, belanja tunjangan beras PNS, belanja tunjangan beras PPPK, belanja tunjangan pph/tunjangan khusus PNS, belanja pembulatan gaji PNS, belanja pembulatan gaji PPPK, belanja iuran jaminan kesehatan PNS, belanja iuran jaminan kesehatan PPPK, belanja iuran jaminan



- kecelakaan kerja PNS, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK, belanja iuran jaminan kematian PNS, belanja iuran jaminan kematian PPPK, belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS, dan belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK.
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, anggaran tersedia sebesar Rp. 391.090.000,- dan terealisasi Rp. 374.903.000,- atau 95,86%%. Dana tersebut digunakan untuk belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan, belanja honorarium pengadaan barang/jasa, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, serta belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, anggaran tersedia Rp. 50.658.600,- dan terealisasi Rp 50.658.600,- atau 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, anggaran sebesar Rp. 42.967.000,- dan terealisasi Rp. 42.967.000,- atau 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat.

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, anggaran sebesar Rp. 67.575.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 67.565.000,- atau 99,99%. Dana tersebut digunakan untuk belanja perjalanan dinas.
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, anggaran sebesar Rp. 54.205.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 54.105.000,- atau 99,82%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor, belanja alat/bahan



untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, serta belanja jasa tenaga operator computer dan belanja perjalanan dinas.

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, anggaran sebesar Rp. 47.200.000,- dan terealisasi Rp. 47.180.000,- atau 99,96%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk belanja makanan dan minuman rapat dan perjalanan dinas.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, anggaran sebesar Rp. 130.663.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 129.611.000,- atau 99,19%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, serta belanja jasa tenaga operator komputer.
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, anggaran sebesar Rp. 43.814.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 37.074.827,- atau 84,62 %. Dana tersebut digunakan untuk belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dan belanja perjalanan dinas.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran sebesar Rp. 51.473.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.473.400,- atau 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran sebesar Rp. 81.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 81.450.000,- atau 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos, belanja alat/bahan untuk



kegiatan kantor- bahan komputer, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya.

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran sebesar Rp. 108.899.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 108.874.200,- atau 99,98%. Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan-isi tabung gas, alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, Belanja peralatan dan mesin alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga, dan belanja modal peralatan dan mesin.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran sebesar Rp. 17.662.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.662.000,- atau 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 24.000.000,- atau 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah.
- Fasilitas Kunjungan Tamu, anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 24.000.000,- atau 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran sebesar Rp. 1.463.025.400,- dan terealisasi sebesar Rp 1.462.296.064,- atau 99,95%. Dana tersebut digunakan untuk belanja perjalanan dinas biasa, serta belanja perjalanan dinas dalam kota.
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 12.000.000,- atau 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, anggaran sebesar Rp. 71.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 71.000.000,- atau 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja Modal



Alat Angkutan darat bermotor dan belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 99.918.300,- atau 99,92%. Dana tersebut digunakan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor, Belanja Modal Bangunan Gudang dan Belanja Modal Bangunan Gedung tempat pertemuan.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran tersedia sebesar Rp. 10.480.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.480.000,- atau 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran tersedia sebesar Rp. 166.668.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 160.054.582,- atau 96,03%. Dana tersebut digunakan untuk belanja tagihan telepon, belanja tagihan air, belanja tagihan listrik, serta belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, anggaran tersedia sebesar Rp. 2.302.222.324,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.295.211.213,- atau 99,70%. Dana tersebut digunakan untuk belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan, belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa tenaga keamanan, belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, dan belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, anggaran tersedia sebesar Rp. 547.481.843,- dan terealisasi sebesar Rp.



546.319.504,- atau 99,79%. Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan-bahan bakar dan pelumas, belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan, belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan, serta belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang.

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran tersedia sebesar Rp. 59.880.000,- dan terealisasi sebesar Rp 59.880.000,- atau 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin, belanja pemeliharaan komputer- komputer unit-personal komputer, belanja pemeliharaan komputer- peralatan komputer-peralatan komputer lainnya.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, anggaran tersedia sebesar Rp. 912.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 910.921.940,- atau 99,88%. Dana tersebut digunakan untuk Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya, belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor, Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal, Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan dan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya.

## 2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi, anggaran sebesar Rp. 483.011.000,- dan terealisasi Rp. 472.187.320,- atau 97,76%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, belanja makanan dan



minuman rapat , Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Hibah.

- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi Rp. 0,- atau 0%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, Belanja Jasa dan Belanja Perjalanan Dinas serta Belanja Hibah.

Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman, anggaran sebesar Rp. 52.816.000,- dan terealisasi Rp. 52.511.100,- atau 99,42%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer dan Belanja Perjalanan Dinas.
- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman, anggaran sebesar Rp. 30.250.000,- dan terealisasi Rp. 36.345.000,- atau 120,15%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer dan Belanja Perjalanan Dinas.

Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil, anggaran sebesar Rp. 14.336.500,- dan terealisasi Rp. 8.033.085,- atau 56,03%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer dan Belanja Perjalanan Dinas.



- Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak, anggaran sebesar Rp. 12.084.700,- dan terealisasi Rp. 11.779.170,- atau 97,47%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer dan Belanja Perjalanan Dinas.

Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan, anggaran sebesar Rp. 1.565.000,- dan terealisasi Rp. 1.554.965,- atau 99,36%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer dan Belanja Perjalanan Dinas.

Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain, anggaran sebesar Rp. 66.622.800,- dan terealisasi Rp. 65.676.150,- atau 98,58%. Dana tersebut digunakan untuk Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer, Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, belanja Natura dan Pakan-Pakan , Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya dan Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Hibah.

### 3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN



Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian , dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya, anggaran sebesar Rp. 835.378.400,- dan terealisasi Rp. 772.285.200,- atau 92,45%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer , Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa dan Belanja Perjalanan Dinas.
- Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian, anggaran sebesar Rp. 226.527.600,- dan terealisasi Rp. 24.977.600,- atau 11,03%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa , Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan dan Belanja Perjalanan Dinas.

Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, anggaran sebesar Rp. 28.181.456.000,- dan terealisasi Rp. 27.650.144.070,- atau 98,11%. Dana tersebut digunakan untuk Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer , Belanja Jasa dan Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Hibah,
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, anggaran sebesar Rp. 315.540.000,- dan terealisasi Rp. 313.898.000,- atau 99,48%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer , Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa dan Belanja Perjalanan Dinas.



- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, anggaran sebesar Rp. 4.921.676.000,- dan terealisasi Rp. 4.917.741.900,- atau 99,92%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer , Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Perjalanan Dinas.

#### 4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular, anggaran sebesar Rp. 36.250.000,- dan terealisasi Rp. 36.138.880,- atau 99,69%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas.
- Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp. 451.780.000,- dan terealisasi Rp. 448.959.860,- atau 99,38%. Dana tersebut digunakan untuk Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya, Belanja Jasa, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas.

Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :



- Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM), anggaran sebesar Rp. 6.400.000,- dan terealisasi Rp. 6.359.470,- atau 99,37%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer dan Belanja Perjalanan Dinas.

Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan, anggaran sebesar Rp. 16.088.000,- dan terealisasi Rp. 15.786.590,- atau 98,13%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas.
- Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan, anggaran sebesar Rp. 22.917.000,- dan terealisasi Rp. 22.777.789,- atau 99,39%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas.

## 5. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, anggaran sebesar Rp. 2.250.000,- dan terealisasi Rp. 2.245.000,- atau 99,78%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja



alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak dan Belanja Perjalanan Dinas.

- Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, anggaran sebesar Rp. 35.770.800,- dan terealisasi Rp. 29.062.200,- atau 81,25%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas.
- Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan anggaran sebesar Rp. 1.599.000,- dan terealisasi Rp. 1.549.000,- atau 96,87%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak dan Belanja Perjalanan Dinas.

#### 6. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian, anggaran sebesar Rp. 71.557.600,- dan terealisasi Rp. 70.939.520,- atau 99,14%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas.

#### 7. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, anggaran sebesar Rp. 277.531.000,- dan terealisasi Rp. 270.831.000,- atau 97,59%. Dana tersebut digunakan untuk



belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa dan Belanja Perjalanan Dinas.

- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, anggaran sebesar Rp. 272.469.000,- dan terealisasi Rp. 271.405.300,- atau 99,61%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas.



## BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2024 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi. Dari 2 sasaran yang ditetapkan, 2 (dua) sasaran berpredikat “*Cukup Berhasil*”, 1 (satu) sasaran berpredikat “*Berhasil*”.

Dengan demikian, Tujuan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu yang mengacu pada perencanaan tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja 2024 telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Kapuas Hulu.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu dimasa yang akan datang.

Upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal.
2. Meningkatkan Sumberdaya Aparatur, baik struktural maupun fungsional, melalui pendidikan dan latihan (Diklat) sesuai bidang teknis dan keahliannya.
3. Memberdayakan masyarakat petani dan peternak, melalui penyuluhan dan sosialisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berkaitan dengan bidang pertanian.



4. Memberdayakan Kelembagaan Kelompok Tani, Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan lembaga ekonomi lainnya.
5. Menggali dan memanfaatkan secara optimal berbagai sumber daya agribisnis yang ada melalui pendataan potensi daerah dibidang agribisnis.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan pertanian dan pangan sebagaimana telah ditetapkan.

Atas segala kekurangan isi, materi, pembahasan sangat disadari oleh penyusun, semoga Laporan Kinerja Pemerintah ini dapat menjadi acuan dalam perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan motivasi kerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dimasa mendatang dalam rangka pelayanan publik dibidang pertanian.

Putussibau, Februari 2025  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
Kabupaten Kapuas Hulu



HIASINTUS GUNUNG AGUNG, S.H., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19830705 201001 1 023